

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Novita Febriana dan Yohanes Suhardjo (2012), penelitian ini mengambil judul : *“Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Auditor KAP di Semarang)”*, berhasil membuktikan bahwa pengabdian pada profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas auditor, kewajiban sosial berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas auditor, kemandirian berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas auditor, keyakinan terhadap profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas auditor, hubungan dengan sesama profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas auditor. Profesionalisme auditor yang terdiri dari pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan sesama profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian dari Asih (2006), penelitian ini mengambil judul : *“Pengaruh Pengalaman terhadap Peningkatan Auditor dalam Bidang Auditing (Studi Empiris pada Auditor KAP di Bandung)”*, yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwasecara parsial pengalaman dari lamanya bekerja sebagai auditor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keahlian, pengalaman yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keahlian pengalaman dari banyaknya jenis perusahaan yang telah diaudit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keahlian auditor dalam bidang pengauditan. Secara simultan pengalaman yang diperoleh auditor dari lamanya bekerja sebagai auditor, pengalaman yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan, dan pengalaman yang diperoleh auditor dari banyaknya jenis

perusahaan yang telah diaudit mempunyai pengaruh positif terhadap keahlian auditor dalam bidang auditing.

Penelitian dari A.M. Kurniawanda (1 April 2013), penelitian ini mengambil judul : “*Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Studi Empiris pada Auditor KAP di Palembang)*”, berhasil membuktikan bahwa secara simultan profesionalisme auditor dan etika profesi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat materialitas. Secara parsial profesionalisme auditor yang terdiri dari pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan pada profesi, hubungan sesama profesi, ada tiga variabel yang berpengaruh terhadap tingkat materialitas yaitu kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan etika profesi. Sedangkan pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, dan hubungan sesama profesi tidak berpengaruh terhadap tingkat materialitas.

Penelitian dari Reni Yendrawati (2008), penelitian ini mengambil judul: “*Analisis Hubungan antara Profesionalisme Auditor dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Auditor KAP di Yogyakarta)*”, yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan sesama profesi yang berhubungan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas adalah hanya dimensi keyakinan terhadap profesi. Sedangkan dimensi yang lain (pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, dan hubungan sesama profesi) tidak mempunyai hubungan signifikan. Terdapat korelasi yang positif antara dimensi keyakinan terhadap profesi dengan pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian dari Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto (2008), penelitian ini mengambil judul : “*Influence The Auditor Professionalism, Knowledge Detect Errors, and Professional Ethics with Consideration of Materiality Level CPAs (Studi Empiris pada Auditor KAP di Makassar)*”, berhasil membuktikan bahwa profesionalisme auditor, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh secara positif

terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik dalam proses pengauditan laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat profesionalisme auditor, pengetahuannya dalam mendeteksi kekeliruan dan ketaatannya akan kode etik semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya dalam melaksanakan audit laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah obyek penelitian di Kantor Akuntan Publik (KAP) Jakarta Utara, tahun penelitian 2013.

2.2. Identifikasi Variabel – Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini ada 2 variabel yang dikaitkan, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada faktor-faktor lain. Dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam *Independent Variable* adalah Profesionalisme Auditor.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang saling berhubungan dengan data yang berada pada variabel lain atau variabel yang tergantung pada variabel lain. Variabel terikat berfungsi oleh variabel lain. Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah Tingkat Materialitas.

2.3. Audit dan Akuntan Publik

2.3.1. Definisi Audit dan Akuntan Publik

Menurut Arens & Loebbecke dalam “Auditing” (2004 : 68), yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf menyatakan bahwa audit adalah:

“Auditing adalah proses pengumpulan data dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menemukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten”.

Pengertian akuntan publik menurut Sofyan S. Harahap (2005 : 265) adalah sebagai berikut :

“Akuntan yang memiliki izin dari menteri keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.”

Sedangkan Mulyadi (2002:28) menyatakan bahwa definisi akuntan publik adalah sebagai berikut :

“Akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam standar professional akuntan publik, yaitu jasa auditing, atestasi, akuntansi, review serta jasa konsultasi.”

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa auditing adalah suatu proses pemeriksaan atas suatu entitas ekonomi dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sehingga mampu menetapkan bahwa suatu laporan keuangan adalah benar-benar sesuai dengan kejadian ekonomi pada periode akuntansi tersebut. Untuk dapat memberikan penilaian yang tepat, maka seseorang harus mempunyai pengetahuan khusus dan keterampilan di bidang pemeriksaan akuntansi. Tidak setiap orang yang mengerti akuntansi dapat melaksanakan proses audit, untuk dapat melaksanakan audit seseorang harus memiliki izin dari menteri keuangan atau dari pejabat yang berwenang. Orang yang memiliki izin ini disebut akuntan publik.

Seseorang dapat menjadi akuntan publik dengan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: mempunyai gelar Sarjana Ekonomi, harus mengikuti Ujian Negara Akuntansi untuk memperoleh sebutan akuntan dan harus mempunyai pengalaman sebagai auditor pada kantor akuntan publik atau BPKP paling sedikit 3 tahun.

2.3.2. Jenis Audit

Proses audit yang dilakukan oleh akuntan publik tidak terbatas pada pemeriksaan laporan keuangan saja. Audit dapat dilakukan untuk menentukan efisiensi dan efektifitas operasional dari suatu perusahaan

dan juga dapat untuk menilai ketaatan terhadap suatu aturan tertentu. Menurut Arens (2006 : 89) ini adalah jenis audit :

1) Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan, yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi, telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Asumsi dasar dari suatu audit laporan keuangan adalah bahwa laporan keuangan tersebut akan digunakan oleh kelompok-kelompok yang berbeda untuk tujuan yang berbeda, maka akan jauh lebih efisien mempekerjakan satu auditor untuk melaksanakan audit dan membuat kesimpulan yang dapat diandalkan oleh semua pihak dari pada membiarkan masing-masing pihak melakukan audit sendiri-sendiri.

2) Audit Operasional

Audit operasional merupakan penelaahan dari bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaannya. Efisiensi dan efektifitas operasi suatu organisasi jauh lebih sulit pengevaluasiannya secara objektif dibandingkn penerapan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit operasional lebih merupakan konsultasi manajemen dari pada audit.

3) Audit Ketaatan

Audit ketaatan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah audit (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditentukan oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Hasil audit ketaatan biasanya tidak dilaporkan kepada pihak luar, tetapi pada pihak tertentu dalam organisasi.

2.3.3. Jenis Auditor

Miller dan Bailey, (2007 : 107) Ada 4 jenis auditor yang paling umum dikenal oleh masyarakat, yaitu :

1) Akuntan Publik Terdaftar

Adalah umum di masyarakat untuk menyebut kantor akuntan publik sebagai auditor walaupun masih ada auditor lain diluar akuntan publik terdaftar. Persyaratan menjadi seorang akuntan publik terdaftar diatur oleh menteri keuangan, terakhir dengan keputusan no. 763 tahun 1986. Kantor akuntan publik sebagai auditor independen bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya.

2) Auditor Pemerintah

Pada sektor pemerintah, yang melakukan audit atas laporan keuangan dan sebagian besar informasi keuangan pemerintah adalah BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Sebagian tugas-tugas BPKP tidak berbeda dengan kantor akuntan publik, BPKP juga sering kali melakukan evaluasi efisiensi dan efektifitas operasi berbagai program pemerintah dan BUMN.

3) Auditor Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab atas penerimaan Negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Aparat pelaksana DJP di lapangan adalah KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan kantor pemeriksaan dan peyelidikan pajak (karikpa), yang mempunyai auditor-auditor khusus. Audit semacam ini sebenarnya audit ketaatan.

4) Audit Intern

Audit intern bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan, seperti halnya auditor pemerintah bagi pemerintah. Auditor intern wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

2.3.4. Proses Pengauditan Laporan Keuangan

Tujuan menyeluruh dari suatu audit laporan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah menyajikan

secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses diagnostik untuk membuat pertimbangan tentang akun yang mungkin mengandung salah saji yang material serta memperoleh bukti tentang penyajian yang wajar dalam laporan keuangan melibatkan sejumlah langkah. Menurut Abdul Halim (2005 : 126) ada tujuh langkah pokok yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam proses pengauditan laporan keuangan :

1. Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri.
2. Mengidentifikasi asersi laporan keuangan yang relevan.
3. Membuat keputusan tentang jumlah yang material bagi para pengguna laporan keuangan.
4. Membuat keputusan tentang komponen risiko audit.
5. Memperoleh bukti melalui prosedur audit, termasuk prosedur untuk memahami pengendalian intern, melaksanakan pengujian pengendalian, dan melaksanakan pengujian substantif.
6. Menetapkan bagaimana menggunakan bukti untuk mendukung suatu pendapat audit, komunikasi kepada klien lain, serta jasa bernilai tambah.
7. Mengkomunikasikan temuan-temuan.

Berikut ini adalah ikhtisar singkat bagaimana elemen-elemen ini dapat dipadukan bersama dalam pelaksanaan suatu audit. Seorang auditor harus mengembangkan *pemahaman tentang bisnis dan industri* agar dapat memahami substansi ekonomi suatu transaksi entitas dan bagaimana agar dapat mengelola audit tersebut dengan baik, maka auditor harus membagi audit menjadi audit-audit atas saldo akun pertama dan golongan transaksi, dan kemudian audit atas asersi laporan keuangan untuk setiap saldo akun dan golongan transaksi.

2.4. Profesionalisme Auditor

2.4.1. Definisi Profesionalisme

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002 : 102) profesi adalah :

“Suatu bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian tertentu seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya.”

Menurut Arens & Loebbecke (2006 : 74) profesionalisme adalah :

“Perilaku yang diharapkan pada seseorang di tingkat tertinggi dari anggota suatu perkumpulan.”

2.4.2. Dimensi Profesionalisme

Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor eksternal. Profesional dalam profesi eksternal auditor oleh Sri Lastanti (2005:168) dinyatakan didalam 5 dimensi profesionalisme, yaitu :

1) Pengabdian pada Profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang memadai. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini telah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.

Pengabdian kepada profesi merupakan suatu komitmen yang terbentuk dari dalam diri seseorang profesional, tanpa paksaan dari siapapun, dan secara sadar bertanggungjawab terhadap profesinya (Elisha dan Icuk, 2010 : 108). Seseorang yang melaksanakan sebuah pekerjaan secara ikhlas maka hasil pekerjaan tersebut akan cenderung lebih baik dari pada seseorang yang melakukannya dengan terpaksa.

2) Kewajiban Sosial

Kewajiban sosial adalah suatu pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun oleh para profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hastuti *et al.* (2003 :98) menyatakan bahwa kewajiban sosial mempunyai hubungan yang positif terhadap tingkat materialitas. Kesadaran auditor tentang peran profesinya di masyarakat akan menumbuhkan sikap mental untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin.

3) Kemandirian terhadap Profesi

Kemandirian dimaksudkan bahwa sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional. Banyak orang yang menginginkan pekerjaan dengan hak-hak istimewa untuk membuat keputusan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut yang bersangkutan dalam situasi khusus.

Kebutuhan untuk mandiri (*Autonomy demand*) merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (Pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi).

4) Keyakinan terhadap Profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

Keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi (*belief self regulation*) dimaksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai

pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan ”orang luar” yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5) Hubungan sesama Profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan para profesional membangun kesadaran profesional.

Dedikasi pada profesi (*dedication*) dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik berkurang. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan setelah itu baru materi.

Masyarakat telah memberi arti khusus pada istilah profesional. Mereka diharapkan untuk bertindak pada tingkat yang lebih tinggi dari pada kebanyakan anggota masyarakat. Istilah profesional berarti tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat.

Alasan yang mendasari diperlukan perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional meningkat jika profesi mewujudkan standar kerja dan perilaku yang tinggi.

2.4.3. Profesionalisme dalam Standar Umum Auditing

Profesionalisme auditor juga ditetapkan dalam standar auditing yang berlaku umum, yang merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Ikatan Akuntansi Indonesia, (2009 : 167) dengan standar umum yang ketiga berbunyi demikian :

“Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.”

Standar umum yang ketiga ini berhubungan dengan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam semua aspek audit. Secara sederhana, ini berarti auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan, atau kepedulian profesional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran walaupun tidak dapat diharapkan bertindak sempurna dalam setiap situasi.

2.4.4. Prinsip Perilaku Profesional

Ikatan Akuntan Indonesia juga berusaha menetapkan aturan, prinsip dan kode etik dalam berperilaku bagi para akuntan publik agar dapat menjaga profesionalismenya sebagai suatu profesi kepercayaan masyarakat.

Prinsip perilaku profesional ini tidak dirumuskan secara khusus oleh Ikatan Akuntansi Indonesia tetapi dianggap dapat menjiwai perilaku IAI, beraitan dengan karakteristik tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan. Prinsip-prinsip perilaku profesional tersebut adalah :

1. Tanggung Jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, akuntan harus mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas mereka.

2. Kepentingan Masyarakat. Akuntan harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan yang mendahulukan kepentingan masyarakat, menghargai kepercayaan masyarakat dan menunjukkan komitmen kepada profesionalisme.
3. Integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, akuntan harus melaksanakan semua tanggungjawab profesional dengan integritas tinggi.
4. Objektivitas dan Independensi. Akuntan harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam melakukan tanggung jawab profesional. Akuntan yang berpraktik seperti akuntan publik harus bersikap independen pada kenyataan dan penampilan dalam waktu melaksanakan audit dan jasa attestasi lain.
5. Keseksamaan. Akuntan harus memenuhi standar teknis dan etika profesi, berusaha keras untuk terus meningkatkan kompetensi dan mutu jasa, dan melaksanakan tanggungjawab profesional dengan kemampuan terbaik.
6. Lingkup dan Sifat Jasa. Dalam menjalankan praktik sebagai akuntan publik, akuntan harus mematuhi prinsip-prinsip perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan jenis jasa yang akan diberikan.

2.4.5. Kode Etik Akuntan Indonesia

Kode etik ini meliputi peraturan yang jelas yang harus ditaati oleh semua akuntan yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik. Anggota IAI yang tidak berpraktik sebagai akuntan publik hanya berkewajiban untuk menaati sebagian dari ketentuan dalam kode etik tersebut.

2.5. Tingkat Materialitas

2.5.1. Definisi Materialitas

Menurut IAI dalam SPAPnya mendefinisikan materialitas sebagai :

“Besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji akuntansi dilihat dari keadaan yang melingkupinya yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut”.

Sedangkan FSAB melalui *statement of financial statement concept* no.2 mendefinisikan materilaitas sebagai :

“Besarnya kealpaan atau salah saji informasi akuntansi, yang di dalam lingkungan tersebut membuat kepercayaan seseorang berubah atau terpengaruh oleh adanya kealpaan dan salah saji tersebut.

Materialitas dalam akuntansi adalah sesuatu yang relatif, nilai kuantitatif yang penting dari beberapa informasi keuangan, bagi para pemakai laporan keuangan dalam konteks pembuatan keputusan (Simamora, Henry.2005 : 297).

Peranan konsep materialitas adalah mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi akuntansi yang dibutuhkan auditor dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan barang bukti. Oleh karena pertimbangan materialitas meliputi pertimbangan kantitatif dan kualitatif. Ukuran materialitas kuantitaif misalnya: 2,5% dari laba bersih sesudah pajak, 1% dari total aktiva dan sebagainya. Sedangkan ukuran materialitas yang kualitatif berkaitan dengan penyebab terjadinya salah saji, misalnya karena pelanggaran hukum. Pertimbangan kuantitatif yang menyatakan tidak material, secara kualitatif dapat material karena mungkin berkaitan dengan ketidakberesan dan pelanggaran hukum tersebut.

The American Accounting Association (AAA) mengklasifikasi faktor yang dipertimbangkan dalam pertimbangan materialitas tersebut :

1. Karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikasi kuantitatif.

- a. Besarnya suatu item (lebih besar/kecil) relatif terhadap pengharapan normal.
 - b. Besarnya suatu item relatif terhadap item-item serupa (relatif terhadap total dari terjadinya laba periode tersebut dan lain-lain).
2. Karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikansi kualitatif.
- a. Tindakan bawaan penting, aktifitas atau kondisi yang tercerminkan (tidak bias, tidak diharapkan, pelanggaran terhadap kontrak).
 - b. Sifat bawaan penting suatu item sebagai indikator dari bagian kejadian dimasa mendatang yang mungkin (pikiran mengenai perubahan dalam praktek usaha dan lain-lain).

2.5.2. Konsep Materialitas

Materialitas dalam akuntansi adalah sesuatu yang relatif, nilai kuantitatif yang penting dari beberapa informasi keuangan, bagi para pemakai laporan keuangan dalam konteks pembuatan keputusan (Frishkoff, 1970 dalam Hastuti dkk, 2003: 1209). Peran konsep materialitas adalah untuk mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi akuntansi yang diperlukan oleh auditor dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan bukti.

Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi seharusnya dikomunikasikan. Dalam laporan akuntansi hanya informasi material yang seharusnya disajikan. Informasi yang tidak material sebaiknya diabaikan atau dihilangkan. Hal tersebut dapat dianalogikan bahwa konsep materialitas juga tidak memandang secara lengkap terhadap semua kesalahan, hanya kesalahan yang mempunyai pengaruh material yang wajib diperbaiki. Material seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan keputusan investor, baik yang hanya berdasarkan tipe informasi tertentu maupun metode informasi yang disajikan.

Informasi yang material dibagi menjadi dua yaitu (Mulyadi,2002:72) :

1. Informasi yang kurang material

Informasi yang kurang material adalah informasi yang penting yang memerlukan penjelasan dalam laporan audit yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian. Informasi ini tidak dapat diabaikan begitu saja.

2. Informasi yang sangat material

Informasi yang sangat material adalah informasi yang sangat penting terhadap pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Pertimbangan yang digunakan oleh auditor dalam menentukan apakah suatu informasi termasuk ke dalam jenis informasi yang kurang atau sangat material meliputi: besar dan sifat informasi, ketidakpastian yang melekat dalam informasi, seberapa jauh dampak informasi tersebut meresap, dan kemungkinan kesalahan yang diakibatkan oleh informasi tersebut.

Dengan demikian pertimbangan tingkat materialitas adalah pertimbangan auditor atas besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut yang dilihat berdasarkan seberapa penting tingkat materialitas, pengetahuan tentang tingkat materialitas, risiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan dan urutan tingkat materialitas dalam rencana audit.

2.5.3. Tingkatan Materialitas

Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi keuangan seharusnya dikomunikasikan dalam laporan akuntansi. Hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan. Konsep materialitas juga tidak memandang secara lengkap terhadap semua kesalahan, hanya kesalahan yang mempunyai pengaruh material yang wajib diperbaiki.

Menurut Yusuf, Haryono, (2006 : 102) dalam menerapkan konsep ini, digunakan 3 tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat :

1. Jumlah tidak material, maka pendapat yang dikeluarkan adalah wajar tanpa pengecualian.
2. Jumlah material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan, maka pendapat yang dikeluarkan adalah pendapat wajar dengan pengecualian.
3. Jumlah yang sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan, maka pendapat yang dikeluarkan adalah tidak wajar atau tidak memberikan pendapat.

Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan.

Menurut Kusharyanti. (2005 ; 199) baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui pendidikan yang sangat penting dalam membentuk proses psikologis dan judgement atau kebijakan. Jika kondisi lingkungan dibuat berdasarkan pengalaman akuntan publik, respon mental yang tiba-tiba merupakan hasil dari seringnya auditor melakukan pertimbangan atas laporan keuangan yang diperiksa.

Dalam penerapannya, mempertimbangkan materialitas dalam situasi tertentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak petunjuk sederhana yang jelas yang dapat membantu auditor untuk memutuskan apakah sesuatu tidak material, material atau sangat material.

Selain diperlukan keahlian dan pengetahuan khusus untuk melakukan pertimbangan tingkat material pada pemeriksaan laporan keuangan juga diperlukan keterampilan dalam menentukan keadaan suatu situasi yang biasanya didapat dari pengalaman auditor. Hal ini dibutuhkan karena banyak kondisi lain yang menyebabkan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian, antara lain: ruang

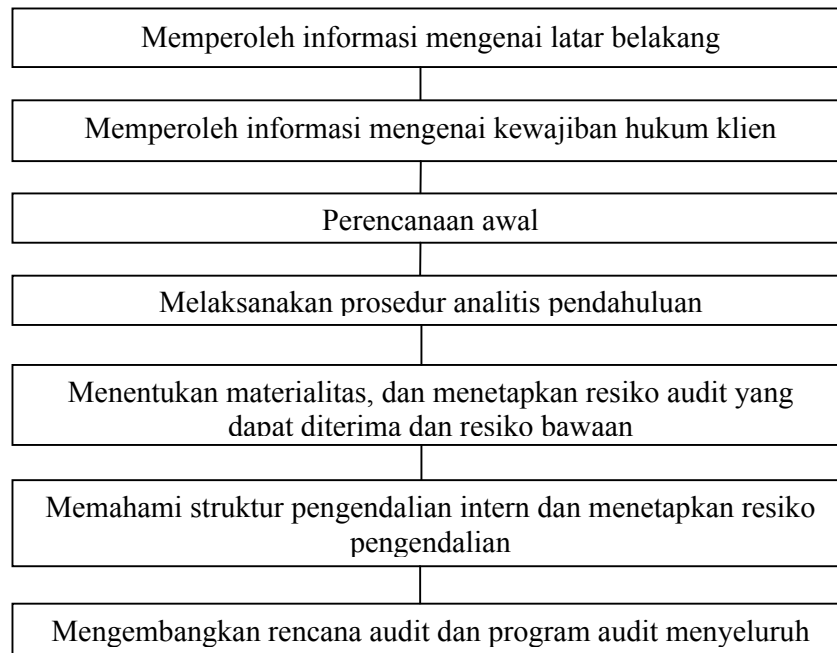
lingkup pemeriksaan yang dibatasi oleh klien atau kondisi tertentu, laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, auditor tidak independen, prinsip akuntansi tidak disajikan secara konsisten, ketidakpastian mempengaruhi laporan keuangan.

2.5.4. Materialitas dan Perencanaan Audit

Materialitas merupakan salah satu konsep penting dalam audit laporan keuangan karena mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Auditor perlu mempertimbangkan materialitas sebagai salah satu faktor untuk menentukan sifat atau jenis, dan bagaimana prosedur auditnya. Bagan perencanaan dan perancangan pendekatan audit dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1

Perencanaan Audit dan Perancangan Pendekatan Audit



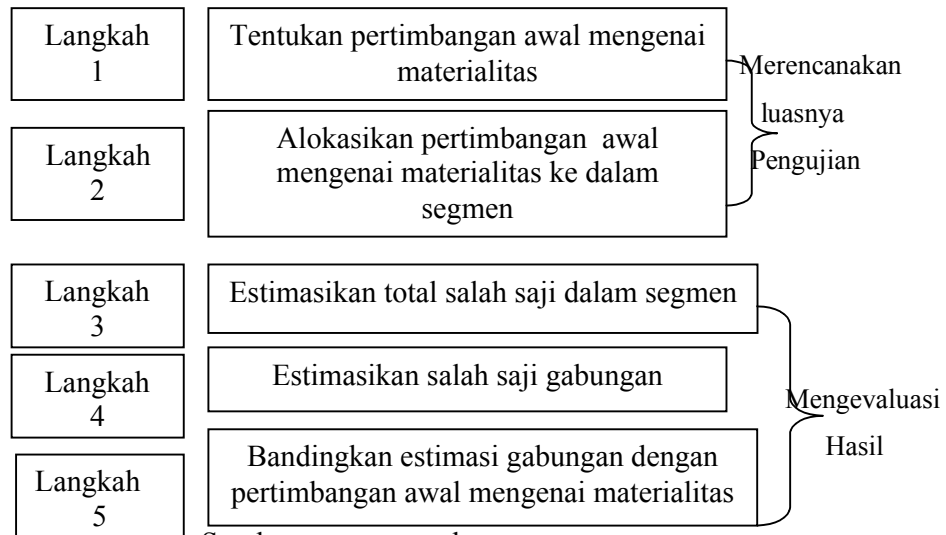
Sumber : www.google.com

2.5.5. Langkah-Langkah Penetapan Materialitas

Dalam menetapkan materialitas, auditor harus melakukannya dengan langkah yang sistematis seperti yang terlihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2

Langkah – langkah Dalam Menerapkan Materialitas



Sumber : www.google.com

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dua langkah pertama dari penerapan materialitas yaitu menentukan pertimbangan awal materialitas dan mengalokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas kedalam segmen merupakan penentu untuk merencanakan luasnya pengujian dalam perencanaan dan perancangan pendekatan audit. Sedangkan tiga langkah terakhir yaitu mengestimasi total salah saji dalam segmen, mengestimasi salah saji gabungan, dan membandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal mengenai materialitas berguna untuk mengevaluasi hasil dari penetapan tingkat materialitas.

2.5.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi pertimbangan awal jumlah materialitas adalah sebagai berikut (Purnomo, Adi, 2007 : 102)

:

- 1) Materialitas sebagai konsep yang relatif dan bukan absolut salah saji dalam jumlah. Salah saji dalam jumlah tertentu dapat dianggap material pada sebuah perusahaan kecil, tapi tidak material pada perusahaan besar.
- 2) Beberapa dasar yang dibutuhkan untuk menetapkan materialitas, karena sifatnya yang relatif, diperlukan basis untuk menentukan tingkat materialitas suatu salah saji, misalnya laba sebelum pajak. Penting juga untuk ditelaah apakah salah saji akan mempengaruhi basis penetapan materialitas yang lain seperti aktiva lancar, total aktiva, utang lancar dan modal sendiri.
- 3) Faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi materialitas, beberapa salah saji tertentu lebih penting bagi sementara pemakai dibanding yang lain.

2.6. Hubungan Profesionalisme dengan Tingkat Materialitas

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertimbangan tingkat materialitas. Disini akan dibahas hubungan profesionalisme dengan pertimbangan tingkat materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut atau suatu error yang sangat sulit untuk diukur dan ditentukan tergantung pada pertimbangan dari auditor (Mulyadi, 2002 :158). Keadaan tersebut mengidentifikasi bahwa dalam suatu audit dibutuhkan akurasi-akurasi prosedur audit yang tinggi untuk mengetahui atau bila mungkin meminimalkan unsur resiko dalam suatu audit. Disinilah sikap profesionalisme auditor dibutuhkan dalam menentukan tingkat materialitas dari laporan keuangan yang diaudit. Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan.

Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan mengandung salah saji yang dampaknya secara individu atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Salah saji dapat terjadi akibat penerapan yang keliru dari prinsip akuntansi tersebut, penyimpangan fakta, atau dihilangkannya informasi yang diperlukan. Pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung sangat penting dalam membentuk struktur proses psikologis dari judgment (pertimbangan).

Dalam standar profesional akuntan publik dalam standar auditing, standar umum yang ketiga dinyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama” untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional auditor harus membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan. Perencanaan yang dibuat di dalamnya juga menyangkut penentuan tingkat materialitas. Secara logis dapat ditarik benang merah bahwa semakin profesional seorang auditor semakin tepat dalam menentukan tingkat materialitas.

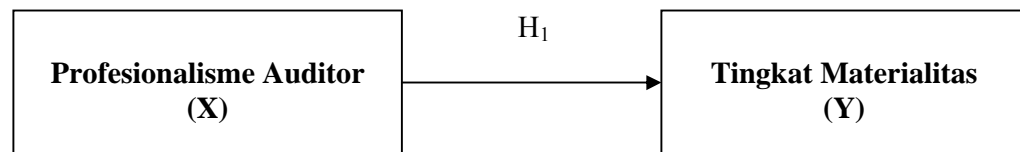
2.7. Kerangka Berpikir

Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor eksternal gambaran seseorang yang profesional dalam profesi dicerminkan kedalam lima hal yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi. Auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan.

Pertimbangan materialitas juga sangat terpengaruh oleh profesionalisme auditor. Auditor yang mempunyai rasa pengabdian dan tanggungjawab kepada masyarakat akan memberikan pertimbangan yang lebih baik dengan tujuan memberikan informasi yang akurat demi kesejahteraan masyarakat. Menentukan pertimbangan materialitas ini bukanlah pekerjaan yang mudah,

karena itu kualitas pengetahuan dan pengalaman menjadi salah satu syarat seseorang dapat disebut berprofesi sebagai akuntan publik, selanjutnya ketaatan terhadap etika, peraturan dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dan tanggungjawab terhadap tugasnya membuat seseorang menjadi seseorang profesional.

Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Variabel X = Profesionalisme Auditor

Variabel Y = Tingkat Materialitas

2.7.1. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu permasalahan yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Ada hubungan profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Jakarta Utara

H₂ : Tidak ada hubungan profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Jakarta Utara